



Analisis Peluang dan Dampak Dekolonialisasi Kurikulum Sejarah Indonesia

Ahmad Subair

Universitas Negeri Makassar

Alamat: Jl AP. Pettarani

Korespondensi penulis: historiografi48@email.com

Abstrak. *Decolonising Indonesia's history curriculum is important in the context of forming an inclusive and accurate national identity. The background of this research focuses on the influence of colonialism on the presentation of history in educational curricula that still prioritise colonial perspectives. This research aims to explore how the history curriculum can be decolonised to reflect a more just and diverse narrative. This research uses a qualitative approach with a case study of history curriculum studies, aiming to explore and compare the effects of a curriculum with a colonial perspective and a decolonial curriculum proposal for the history curriculum, in the context of the Merdeka curriculum and Curriculum 2013. The results showed that there is a need to revise the history curriculum to include local perspectives and pay attention to marginalised voices in historical narratives. In addition, this research identifies various strategies that can be applied in developing a more inclusive and contextualised curriculum, including the involvement of local communities in the preparation of teaching materials. The findings are expected to make a significant contribution to history education reform in Indonesia.*

Keywords: *Decolonialization, History Curriculum, Historical Narrative.*

Abstrak. Dekolonialisasi kurikulum sejarah Indonesia menjadi penting dalam konteks pembentukan identitas nasional yang inklusif dan akurat. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pengaruh kolonialisme terhadap penyajian sejarah di kurikulum pendidikan yang masih mengedepankan perspektif kolonial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kurikulum sejarah dapat didekolonialisasi untuk mencerminkan narasi yang lebih adil dan beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus kajian kurikulum sejarah, bertujuan untuk menggali dan membandingkan efek dari kurikulum dengan perspektif kolonial dan ajuan kurikulum dekolonial kurikulum sejarah, dalam konteks kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk merevisi kurikulum sejarah agar mencakup perspektif lokal dan memperhatikan suara yang terpinggirkan dalam narasi sejarah. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum yang lebih inklusif dan kontekstual, termasuk pelibatan masyarakat lokal dalam penyusunan materi ajar. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam reformasi pendidikan sejarah di Indonesia.

Kata Kunci: *Dekolonialisasi, Kurikulum Sejarah, Narasi Sejarah.*

PENDAHULUAN

Sejarah adalah disiplin ilmu yang memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan memori kolektif suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan sejarah menjadi sarana penting dalam menanamkan kesadaran nasionalisme, kebanggaan akan warisan budaya, serta pemahaman tentang proses panjang menuju kemerdekaan. Namun, hingga kini, warisan kolonial dalam kurikulum sejarah masih menjadi tantangan besar. Meski Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade, pengaruh kolonialisme dalam struktur dan narasi sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah masih sangat terasa. Oleh karena itu, upaya dekolonialisasi kurikulum sejarah menjadi kebutuhan mendesak guna memperkuat pemahaman sejarah nasional yang lebih inklusif dan mengangkat narasi-narasi lokal yang selama ini terpinggirkan (Maulidan & Darmawan, 2024).

Received Juli30, 2024; Revised Agustus 30, 2024; Oktober 02, 2024

** Ahmad Subair, historiografi48@email.com*

Kolonialisme Belanda di Indonesia tidak hanya meninggalkan jejak di bidang politik, ekonomi, dan sosial, tetapi juga di ranah pendidikan. Sistem pendidikan kolonial yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja lokal yang terdidik namun tetap loyal pada pemerintah kolonial. Dalam konteks sejarah, narasi yang disajikan cenderung berfokus pada superioritas Eropa dan marginalisasi pengalaman serta kontribusi lokal (Wardhana, 2023). Hal ini sejalan dengan teori-teori poskolonial yang menyatakan bahwa pendidikan dalam konteks kolonial digunakan sebagai alat hegemoni budaya, di mana sejarah ditulis dan diajarkan dari perspektif penjajah, sementara suara-suara lokal sering kali diabaikan atau dikerdilkan (Wardhani, 2016).

Pasca kemerdekaan, Indonesia memang melakukan upaya untuk memodernisasi sistem pendidikan, termasuk memasukkan unsur-unsur sejarah nasional ke dalam kurikulum (Wibowo, Pranowo, & Febrianto, 2023). Namun, struktur dasar dari kurikulum sejarah yang diwarisi dari masa kolonial masih tetap dominan. Sejarah nasional yang diajarkan di sekolah-sekolah cenderung mengagungkan tokoh-tokoh elit politik dan militer tanpa memberikan tempat yang cukup bagi sejarah rakyat biasa atau peran penting komunitas lokal dalam proses kemerdekaan (Hasibuan, 2008).

Upaya dekolonialisasi kurikulum tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi tren global, terutama di negara-negara bekas koloni. Di berbagai belahan dunia, tuntutan untuk melakukan dekolonialisasi kurikulum semakin mengemuka sebagai bentuk protes terhadap narasi sejarah yang meminggirkan pengalaman dan perspektif masyarakat lokal. Dekolonialisasi pendidikan mengacu pada proses menghapus atau menantang dominasi budaya kolonial dalam kurikulum, yang sering kali terlihat dalam penekanan berlebihan pada perspektif Barat dan penyingkiran sejarah serta budaya lokal (Shesgreen, 2009).

Sebagai contoh, gerakan dekolonialisasi di Afrika dan Asia menunjukkan bahwa pengajaran sejarah di negara-negara bekas koloni perlu merekonstruksi narasi-narasi lokal dan regional yang relevan (Boix, Stokes, & Asnawi, 2021). Di Afrika Selatan, misalnya, pendidikan sejarah yang dahulu didominasi oleh pandangan Eropa telah direformasi untuk mencerminkan perspektif orang Afrika asli (Agus, 2013). Di Amerika Latin, studi tentang sejarah lokal dan kontribusi masyarakat adat menjadi fokus dalam upaya dekolonialisasi (Segovia-Tzompa, Casimero, & Apagüño, 2024).

Di Indonesia, kebutuhan untuk mendekolonialisasi kurikulum sejarah didasarkan pada pentingnya menempatkan pengalaman lokal dan perspektif rakyat sebagai inti dari narasi sejarah nasional. Dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak akademisi dan pendidik yang menyerukan pentingnya memperluas cakupan sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah agar lebih inklusif dan relevan bagi masyarakat Indonesia yang beragam (Tarc, 2023).

Dekolonialisasi kurikulum sejarah di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan pengaruh kolonial dalam narasi sejarah, tetapi juga untuk menghadirkan sejarah yang lebih pluralistik dan kontekstual. Proses ini mencakup pengintegrasian sejarah lokal, pengalaman komunitas-komunitas adat, serta kontribusi kelompok-kelompok minoritas yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam narasi sejarah resmi. Dengan demikian, dekolonialisasi kurikulum akan membantu menciptakan generasi muda yang lebih sadar akan keragaman sejarah dan budaya bangsanya, serta lebih kritis dalam memaknai masa lalu.

Proses dekolonialisasi kurikulum sejarah di Indonesia tentu tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan. Narasi sejarah yang telah mapan selama bertahun-tahun sering kali dianggap sebagai kebenaran mutlak yang sulit untuk diubah.

Pihak-pihak yang merasa nyaman dengan status quo mungkin melihat upaya dekolonialisasi sebagai ancaman terhadap legitimasi sejarah nasional yang sudah ada (Sari & Sirozi, 2023).

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendidikan juga menjadi hambatan dalam proses ini. Upaya dekolonialisasi memerlukan penelitian mendalam terhadap sejarah lokal yang sering kali kurang terdokumentasi dengan baik. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki sejarah lokal yang kaya, namun tidak terdokumentasikan secara formal dalam buku-buku pelajaran. Oleh karena itu, kolaborasi antara akademisi, guru, dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk mendukung proses ini (Anas, Et.al, 2015).

Tantangan lainnya adalah kurangnya pelatihan bagi para pendidik dalam mengajar sejarah dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual. Banyak guru sejarah yang telah terbiasa dengan metode pengajaran tradisional dan mungkin merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan pendekatan baru yang menekankan pada narasi lokal dan perspektif yang beragam. Dalam hal ini, pelatihan dan pengembangan profesional bagi para guru sangat penting untuk mendukung transisi menuju kurikulum yang lebih terdekolonialisasi (Iskandar, 2022).

Dekolonialisasi kurikulum sejarah di Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan yang inklusif, di mana semua suara dan pengalaman, baik dari pusat maupun daerah, diakomodasi dalam narasi sejarah nasional (Udasmoro, 2020). Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memperluas cakupan materi sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah agar mencakup lebih banyak cerita dari daerah-daerah di luar Pulau Jawa, serta memberikan perhatian khusus pada kontribusi kelompok-kelompok minoritas dan masyarakat adat.

Penggunaan media pembelajaran yang inovatif juga dapat mendukung upaya ini. Misalnya, penggunaan matriks waktu yang menghubungkan peristiwa lokal dengan peristiwa nasional dapat membantu siswa untuk memahami keterkaitan antara sejarah lokal dan nasional secara lebih jelas (Kulyasin & subair, 2023). Selain itu, penggunaan teknologi digital untuk mendokumentasikan dan menyebarkan sejarah lokal juga bisa menjadi solusi untuk menghadirkan narasi yang lebih beragam dan inklusif (Syahputra, Et.al, 2020).

Di sisi lain, dekolonialisasi kurikulum juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Komunitas lokal dapat berperan dalam memberikan kontribusi terhadap penulisan dan pengajaran sejarah mereka sendiri (Rosyid, 2009). Dengan demikian, proses ini tidak hanya menjadi proyek akademis semata, tetapi juga gerakan sosial yang melibatkan berbagai pihak untuk membentuk narasi sejarah yang lebih inklusif dan adil.

Dekolonialisasi kurikulum sejarah di Indonesia adalah langkah penting dalam membangun pemahaman sejarah yang lebih inklusif dan kontekstual. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menghapus pengaruh kolonial dalam narasi sejarah, tetapi juga untuk mengangkat sejarah lokal, pengalaman komunitas adat, serta kontribusi kelompok-kelompok minoritas yang selama ini kurang diperhatikan. Meski menghadapi berbagai tantangan, dekolonialisasi kurikulum memiliki potensi besar untuk memperkaya pemahaman sejarah nasional serta membangun generasi muda yang lebih kritis dan sadar akan keragaman sejarah dan budaya Indonesia.

Pada kajian ini dapat di lihat secara luas perbuahan kurikulum dan dinamikanya. Analisis teks sangat di butuhkan guna melihat apakah pengaruh kolonialisme sangat kuat tertanam dalam kurikulum di indonesia atau terdapat gerakan besar besaran dalam melihat sejarah bangsa yang multi perspektif. Manir untuk dilihat jauh lebih dalam lagi.

KAJIAN TEORITIS

Dekolonialisasi dalam konteks kurikulum pendidikan, khususnya sejarah, merujuk pada upaya untuk menyingkirkan pengaruh kolonial dari struktur dan isi pendidikan. Di Indonesia, urgensi dekolonisasi muncul karena kurikulum yang saat ini digunakan masih mewarisi struktur narasi sejarah yang didominasi oleh perspektif kolonial dan sentralistik. Dalam kajian teoritis ini, konsep dekolonisasi kurikulum sejarah akan dibahas dalam kerangka teori-teori pendidikan, poskolonialisme, dan sejarah lokal. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dekolonisasi kurikulum sejarah di Indonesia dapat memberikan ruang bagi narasi-narasi lokal dan pluralistik (Dannari, Et. al, 2021).

Teori Pendidikan Kritis

Dalam upaya memahami pentingnya dekolonisasi kurikulum sejarah, teori pendidikan kritis dari Paulo Freire dapat dijadikan landasan. Freire berpendapat bahwa pendidikan tidak boleh hanya berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk emansipasi sosial dan politik. Freire menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan siswa dari hegemoni kekuasaan dan narasi dominan yang menindas. Dalam konteks ini, kurikulum sejarah yang didominasi oleh perspektif kolonial dapat dianggap sebagai alat penindasan, karena mengabaikan pengalaman dan perspektif masyarakat lokal yang pernah menjadi korban kolonialisme (Abdillah, 2017).

Freire memperkenalkan konsep "pendidikan sebagai praktek kebebasan", di mana guru dan siswa harus berperan sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran, bukan objek yang hanya menerima pengetahuan dari sistem yang telah ditentukan. Kurikulum sejarah yang berorientasi pada dekolonisasi berupaya mengubah paradigma ini dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek sejarah, bukan sekadar pelengkap dalam narasi sejarah nasional yang sentralistik (Freire, 1984).

Teori Poskolonial

Teori poskolonial, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Edward Said, Frantz Fanon, dan Gayatri Spivak, juga menjadi dasar penting dalam memahami dekolonisasi kurikulum sejarah. Edward Said dalam bukunya "Orientalism" (1978) menyatakan bahwa kolonialisme tidak hanya meninggalkan dampak ekonomi dan politik, tetapi juga warisan budaya yang terus hidup dalam bentuk cara pandang dan representasi. Menurut Said, penulisan sejarah di negara-negara bekas koloni sering kali didominasi oleh narasi "Barat" yang meminggirkan perspektif lokal (McAlister, 2002).

Dalam konteks Indonesia, kolonialisme Belanda meninggalkan warisan intelektual yang sangat besar, termasuk dalam cara sejarah ditulis dan diajarkan. Narasi sejarah yang dihasilkan oleh penjajah cenderung mereduksi peran masyarakat lokal menjadi subjek yang pasif dan terpinggirkan. Dekolonisasi kurikulum sejarah di Indonesia, dengan demikian, bertujuan untuk mengoreksi narasi-narasi tersebut dengan menghadirkan perspektif yang lebih pluralistik dan menempatkan pengalaman lokal sebagai bagian integral dari sejarah nasional.

Frantz Fanon, dalam bukunya "The Wretched of the Earth" (1961), berargumen bahwa kolonialisme menciptakan inferioritas budaya di kalangan masyarakat lokal, yang kemudian menjadi dasar untuk mendominasi mereka secara politik dan ekonomi. Fanon menyarankan bahwa proses dekolonisasi harus dimulai dengan memulihkan identitas budaya lokal yang telah dihancurkan oleh kolonialisme. Dalam konteks ini, kurikulum sejarah yang mendekolonisasi harus memperhatikan pentingnya mengangkat kembali sejarah, budaya, dan tradisi lokal yang selama ini diabaikan dalam narasi sejarah dominan (Obeng-Odoom, 2016).

Konsep Sejarah Lokal

Sejarah lokal memainkan peran penting dalam proses dekolonisasi kurikulum. Douch (1967) (Syahputra et al., 2020) berpendapat bahwa sejarah lokal sering kali membantu mengatasi kesenjangan antara sekolah dan dunia nyata, karena sejarah lokal lebih dekat dengan pengalaman dan realitas sehari-hari masyarakat. Dalam konteks pendidikan, pengajaran sejarah lokal memungkinkan siswa untuk lebih memahami identitas dan jati diri mereka dalam kaitannya dengan sejarah nasional. Dekolonisasi kurikulum sejarah di Indonesia berupaya untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi narasi sejarah lokal, yang selama ini sering terpinggirkan dalam buku-buku teks sejarah (Kuswono Et.al, 2021).

Menurut Van Sledright (2004), pengajaran sejarah lokal memungkinkan siswa untuk terlibat lebih dalam dalam pembelajaran sejarah karena mereka dapat melihat keterkaitan langsung antara peristiwa sejarah yang dipelajari dan komunitas mereka sendiri. Dalam konteks Indonesia, ini berarti bahwa siswa dari berbagai daerah di Nusantara dapat mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah yang relevan dengan lingkungan mereka, seperti sejarah perjuangan rakyat lokal dalam melawan penjajah, sejarah kerajaan-kerajaan di daerah mereka, dan peran masyarakat lokal dalam proses kemerdekaan (Ni & Hassan, 2023).

Integrasi sejarah lokal ke dalam kurikulum juga dapat membantu memperkuat rasa kebersamaan dalam keanekaragaman. Indonesia adalah negara dengan kekayaan budaya dan sejarah yang sangat beragam, dan dekolonisasi kurikulum sejarah dapat berfungsi sebagai cara untuk mempersatukan narasi-narasi tersebut ke dalam satu kesatuan sejarah nasional yang lebih inklusif dan representatif.

Kurikulum Sejarah: Sentralisasi vs Desentralisasi

Salah satu kritik utama terhadap kurikulum sejarah di Indonesia adalah kecenderungannya yang sentralistik, di mana narasi sejarah didominasi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di Pulau Jawa, khususnya terkait peran tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Sutan Sjahrir. Meskipun tokoh-tokoh ini sangat penting dalam sejarah nasional, pendekatan yang sentralistik ini mengabaikan kontribusi daerah-daerah lain dalam proses pembentukan bangsa Indonesia.

Menurut Thongchai Winichakul (1994), dalam studinya tentang sejarah Thailand, sistem pendidikan sentralistik yang didominasi oleh narasi sejarah ibu kota cenderung mengabaikan pengalaman daerah-daerah pinggiran. Konsep ini relevan juga untuk Indonesia, di mana narasi sejarah yang sentralistik sering kali tidak memberikan tempat yang cukup bagi peran masyarakat di luar Jawa. Dekolonisasi kurikulum sejarah bertujuan untuk mengatasi ketimpangan ini dengan memberikan tempat yang lebih besar bagi sejarah dari daerah-daerah di seluruh Nusantara (Utama, 2017).

Metodologi dan Pendekatan dalam Dekolonialisasi

Untuk menerapkan dekolonisasi dalam kurikulum sejarah, diperlukan pendekatan metodologis yang berbeda. Salah satu pendekatan yang relevan adalah “critical pedagogy”, yang menekankan pentingnya dialog antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Alih-alih melihat siswa sebagai penerima pasif pengetahuan, “critical pedagogy” mendorong siswa untuk menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Dalam konteks dekolonisasi kurikulum sejarah, pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi sejarah dari berbagai perspektif, termasuk perspektif lokal yang mungkin selama ini terabaikan.

Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah “historical inquiry”, di mana siswa diajak untuk melakukan penelitian sejarah sendiri berdasarkan sumber-sumber lokal, seperti arsip, cerita

lisan, dan artefak budaya. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah komunitas mereka sendiri dan melihat bagaimana sejarah lokal berkontribusi terhadap sejarah nasional (Edson, 2004).

Proses dekolonisasi kurikulum sejarah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi dari pihak-pihak yang merasa nyaman dengan narasi sejarah yang sudah mapan. Narasi sejarah yang dominan sering kali dianggap sebagai kebenaran mutlak, sehingga setiap upaya untuk mengubahnya dapat dianggap sebagai ancaman terhadap identitas nasional yang sudah dibentuk.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendidikan juga menjadi kendala dalam proses dekolonisasi. Untuk menerapkan kurikulum sejarah yang lebih inklusif, diperlukan penelitian yang mendalam terhadap sejarah lokal yang sering kali kurang terdokumentasi. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki sejarah yang kaya, namun sumber-sumber sejarah tersebut belum banyak diakses atau dipublikasikan.

Kurangnya pelatihan bagi para guru juga menjadi hambatan dalam implementasi dekolonisasi kurikulum sejarah. Guru-guru yang telah terbiasa dengan metode pengajaran tradisional mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan pendekatan baru yang menekankan pada sejarah lokal dan perspektif yang lebih beragam. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional bagi para pendidik sangat penting untuk mendukung proses dekolonisasi.

Dekolonisasi kurikulum sejarah di Indonesia adalah langkah penting dalam membangun pemahaman sejarah yang lebih inklusif dan pluralistik. Dalam kajian ini, telah dibahas bagaimana teori-teori pendidikan kritis, poskolonialisme, dan sejarah lokal dapat menjadi dasar bagi upaya dekolonisasi. Meskipun proses ini menghadapi berbagai tantangan, dekolonisasi kurikulum sejarah memiliki potensi besar untuk memperkaya pemahaman generasi muda tentang sejarah Indonesia yang lebih beragam, serta membantu menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan sadar akan warisan budaya dan sejarah mereka sendiri.

Dengan mengintegrasikan sejarah lokal dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, kurikulum yang terdekolonialisasi dapat menjadi alat untuk emansipasi intelektual dan sosial. Kurikulum sejarah yang lebih inklusif tidak untuk mengakui suara yang selama ini terpinggirkan, tetapi juga mempersatukan perspektif sejarah dari berbagai wilayah dan komunitas di Indonesia. Terlepas dari tantangan yang ada, upaya dekolonisasi ini tidak hanya akan memperkaya wawasan sejarah, tetapi juga mengajak generasi muda untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap masa lalu dan masa kini, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang lebih tanggap terhadap pluralitas dan kompleksitas bangsa ini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus kajian kurikulum sejarah, bertujuan untuk menggali dan membandingkan efek dari kurikulum dengan perspektif kolonial dan ajuan kurikulum dekolonial kurikulum sejarah, dalam konteks kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 (Harahap, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif di beberapa sekolah, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang mendalam tentang kurikulum sejarah dengan dua perspektif. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola yang muncul dari data, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak kurikulum sejarah (Fajri, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai dekolonisasi kurikulum sejarah di Indonesia menyoroti adanya pergeseran dari narasi kolonial yang sebelumnya mendominasi pengajaran sejarah, menuju penyusunan kurikulum yang lebih inklusif dan reflektif terhadap sejarah lokal dan pengalaman pascakolonial. Meskipun secara formal Indonesia telah merdeka sejak 1945, warisan kolonial masih sangat terasa dalam struktur kurikulum sejarah nasional. Penelitian ini meneliti bagaimana materi yang mengandung perspektif kolonial dikaji ulang dan direvisi untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi narasi lokal, khususnya sejarah daerah dan komunitas adat yang terpinggirkan.

Materi Kolonial Versus Materi Dekolonial

Materi sejarah kolonial dalam kurikulum yang lebih lama (sebelum era reformasi pendidikan di tahun 1990-an) masih sangat berfokus pada narasi kekuasaan kolonial dan proses kemerdekaan yang berpusat pada tokoh-tokoh besar nasional, seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir. Buku teks sejarah pada kurikulum ini cenderung melihat sejarah Indonesia dalam bingkai besar perjuangan melawan penjajah, di mana peran bangsa Eropa—terutama Belanda—menjadi fokus utama. Namun, materi sejarah pasca-reformasi pendidikan mulai menunjukkan perubahan signifikan. Kurikulum terbaru, khususnya setelah penerapan Kurikulum 2013, mulai mengintegrasikan lebih banyak narasi sejarah lokal dan pluralitas perspektif. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat peningkatan perhatian terhadap sejarah lokal yang sebelumnya terpinggirkan dalam kurikulum. Sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara, seperti Gowa, Bone, dan Ternate, yang dulu hanya disebut secara sekilas, kini diberikan porsi yang lebih besar dalam pembelajaran. Selain itu, sejarah perjuangan di daerah-daerah di luar Jawa juga mulai masuk ke dalam narasi utama.

Dalam konteks ini, teori postkolonial Edward Said tentang *orientalisme* dapat digunakan untuk memahami bagaimana materi kolonial yang lama telah membangun citra inferioritas masyarakat lokal. Materi kolonial seringkali memandang bangsa Indonesia sebagai "yang terbelakang" dan Eropa sebagai "yang maju". Dalam perbandingannya, materi dekolonial mulai menantang asumsi tersebut dengan memberikan narasi yang lebih setara antara pihak penjajah dan masyarakat lokal (Diannita, 2021).

Sejarah Lokal dan Nasional

Salah satu fokus penelitian ini adalah pada upaya untuk menyeimbangkan antara sejarah lokal dan sejarah nasional dalam kurikulum. Sejarah lokal sering kali mengalami marginalisasi dalam narasi besar sejarah nasional, terutama di masa Orde Baru. Narasi sentralistik ini menempatkan peristiwa-peristiwa besar di Pulau Jawa sebagai pusat dari sejarah Indonesia, sementara daerah-daerah lain hanya dianggap sebagai "perifer" yang kurang penting.

Melalui analisis dokumen dan wawancara dengan para guru sejarah, penelitian ini menemukan bahwa upaya dekolonisasi kurikulum memberikan ruang yang lebih besar bagi sejarah lokal untuk berdampingan dengan sejarah nasional. Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan, materi mengenai perlawanan Sultan Hasanuddin melawan VOC, yang dulu hanya dijadikan subtopik kecil dalam konteks sejarah nasional, kini diberikan porsi yang lebih besar dan diajarkan secara lebih rinci. Kurikulum ini juga menekankan bagaimana peristiwa-peristiwa di daerah lain berkontribusi pada sejarah kemerdekaan secara keseluruhan.

Teori *subaltern studies* dari Gayatri Spivak juga relevan dalam konteks ini, karena menekankan pentingnya memberikan suara bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya dibungkam dalam sejarah, seperti masyarakat adat atau kelompok minoritas yang kontribusinya sering diabaikan dalam narasi dominan (Suryawati, Et. al, 2021).

Rekonsiliasi antara Sejarah Nasional dan Lokal

Dalam penerapan kurikulum sejarah yang dekolonial, tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan sejarah lokal dengan narasi sejarah nasional tanpa mengorbankan keduanya. Penelitian ini menemukan bahwa banyak guru sejarah menghadapi kesulitan dalam menjelaskan keterkaitan antara peristiwa lokal dan nasional, karena peristiwa-peristiwa tersebut sering kali terjadi secara paralel tetapi tidak saling berhubungan secara langsung (Latief, 2024).

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa guru yang diwawancarai menggunakan pendekatan pedagogi kritis yang diusulkan oleh Paulo Freire, yang menekankan pentingnya dialog antara guru dan siswa. Siswa diajak untuk meneliti dan membandingkan sejarah lokal mereka dengan sejarah nasional, sehingga mereka dapat melihat bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut saling berhubungan atau bahkan saling bertentangan. Sebagai contoh, di beberapa sekolah di Sulawesi selatan, siswa diajak untuk meneliti sejarah perlawanan rakyat setempat terhadap penjajah Belanda dan bagaimana perjuangan tersebut memiliki konteks yang sama dengan peristiwa yang terjadi di tempat lain di Nusantara (Kusumawati, n.d.).

Selain itu, pengajaran sejarah lokal juga membantu siswa untuk lebih mengenal identitas budaya mereka sendiri. Penelitian ini menemukan bahwa siswa yang mempelajari sejarah daerah mereka sendiri merasa lebih terhubung dengan materi yang diajarkan, karena mereka dapat melihat warisan budaya dan sejarah komunitas mereka dalam konteks yang lebih besar.

Analisis Kurikulum yang Ada: Kurikulum 2013 vs. Kurikulum Merdeka

Penelitian ini juga membandingkan dua kurikulum utama yang digunakan di Indonesia: Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka yang baru diimplementasikan. Kurikulum 2013 memuat sejumlah upaya untuk menyeimbangkan antara sejarah nasional dan lokal, meskipun narasi besar masih cenderung didominasi oleh sejarah nasional. Di sisi lain, Kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan materi sesuai dengan konteks lokal, sehingga memungkinkan adanya interpretasi sejarah yang lebih luas.

Misalnya, dalam Kurikulum 2013, peristiwa-peristiwa besar seperti Proklamasi Kemerdekaan atau Serangan Umum 1 Maret masih menjadi pusat perhatian, sementara sejarah lokal sering kali hanya dilihat sebagai latar belakang. Namun, dalam Kurikulum Merdeka, guru diberikan kebebasan untuk memasukkan lebih banyak sejarah lokal, seperti perjuangan masyarakat di Aceh atau Papua dalam melawan penjajah (Rozi, Et. al, 2021).

Pendekatan desentralisasi ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan perspektif yang lebih holistik tentang sejarah Indonesia. Sejalan dengan teori *multiple perspectives* dari Peter Seixas, dekolonialisasi kurikulum sejarah memungkinkan siswa untuk mempelajari sejarah dari berbagai sudut pandang, sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih kritis dan mendalam.

Tantangan dalam Penerapan Dekolonialisasi

Meskipun ada kemajuan dalam dekolonialisasi kurikulum sejarah, penelitian ini menemukan bahwa tantangan masih ada. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pelatihan bagi guru dalam menyampaikan materi sejarah lokal. Banyak guru yang belum memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang sejarah lokal, sehingga mereka cenderung kembali ke narasi nasional yang lebih familiar.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendidikan juga menjadi kendala dalam mengakses dan menggunakan sumber-sumber sejarah lokal. Banyak sekolah di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke sumber-sumber sejarah yang memadai, sehingga sulit bagi guru untuk mengajarkan sejarah lokal secara mendalam.

Penelitian ini menegaskan bahwa dekolonisasi kurikulum sejarah di Indonesia adalah proses yang kompleks, namun penting untuk menciptakan pemahaman sejarah yang lebih inklusif dan pluralistik. Melalui analisis terhadap perbedaan antara materi kolonial dan dekolonial, serta upaya integrasi antara sejarah nasional dan lokal, penelitian ini menunjukkan bahwa dekolonisasi memberikan ruang bagi narasi-narasi yang selama ini terpinggirkan. Meskipun tantangan masih ada, dengan pelatihan yang tepat dan pengembangan kurikulum yang fleksibel, sejarah Indonesia dapat diajarkan dengan cara yang lebih adil dan representatif bagi semua kelompok di Nusantara.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai dekolonisasi kurikulum sejarah di Indonesia menyoroti adanya pergeseran dari narasi kolonial yang dulu mendominasi pengajaran sejarah menuju kurikulum yang lebih inklusif dan reflektif terhadap sejarah lokal dan pengalaman pascakolonial. Meski Indonesia telah merdeka sejak 1945, warisan kolonial tetap terlihat dalam struktur kurikulumnya. Penelitian ini meninjau ulang materi berperspektif kolonial untuk memberi ruang bagi narasi lokal, termasuk sejarah daerah dan komunitas adat yang terpinggirkan. Kurikulum pascareformasi, terutama Kurikulum 2013, mulai lebih menekankan pluralitas sejarah, mencakup kerajaan Nusantara dan perjuangan di luar Jawa. Hasil penelitian ini menyoroti upaya menyeimbangkan sejarah lokal dan nasional dalam kurikulum sejarah Indonesia, yang sebelumnya didominasi narasi sentralistik Jawa, terutama pada masa Orde Baru. Dekolonisasi kurikulum kini memberi ruang lebih besar bagi sejarah lokal, seperti perlawanan Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, untuk diajarkan secara lebih rinci. Tantangan dalam mengintegrasikan sejarah lokal dan nasional diatasi dengan pendekatan pedagogi kritis, di mana siswa diajak meneliti hubungan antara kedua narasi. Hasilnya, siswa merasa lebih terhubung dengan identitas budaya mereka melalui pembelajaran sejarah lokal yang relevan dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. (2017). Analisis teori dehumanisasi pendidikan Paulo Freire. *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 2(1), 1–21.
- Agus, B. (2013). Politik Apartheid di Afrika Selatan.
- Anas, A. Y., Riana, A. W., & Apsari, N. C. (2015). Desa dan kota dalam potret pendidikan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 418–422.
- Boix, C., Stokes, S. C., & Asnawi, A. (2021). *Perang, Perdagangan dan Pembentukan Negara: Handbook Perbandingan Politik*. Nusamedia.
- Dannari, G. L., Ulfa, M., & Ayundasari, L. (2021). Dekolonisasi: Menuju pembebasan materi pembelajaran Sejarah di Indonesia abad 21. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4), 425–436. <https://doi.org/10.17977/UM063V1I4P425-436>
- Diannita, A. (2021). Analisa Teori Post Kolonialisme Dalam Perspektif Alternatif Studi Hubungan Internasional. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(1), 79–90.
- Edson, C. H. (2004). Our past and present: Historical inquiry in education. In *Qualitative research in education* (hal. 44–58). Routledge.
- Fajri, K. N. (2019). Proses pengembangan kurikulum. *Islamika*, 1(2), 35–48.
- Freire, P. (1984). *Pendidikan sebagai pembebasan*. PT Gramedia.
- Harahap, N. (2020). Penelitian kualitatif.
- Hasibuan, M. U. S. (2008). *Revolusi politik kaum muda*. Yayasan Obor Indonesia.
- Iskandar, K. (2022). Melihat Kembali Potret Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Religious Studies*, 2(02), 68–76.

- Kulyasin, K., & subair, ahmad. (2023). PENGARUH MEDIA MATRIX WAKTU TERHADAP HASIL BELAJAR SEJARAH LOKAL SISWA KELAS XI MAN IC GOWA. *Social Landscape Journal*, 4(3), 165–171. <https://doi.org/10.56680/SLJ.V4I3.53919>
- Kusumawati, N. A. (n.d.). Telaah Kritis Teori Belajar Kognitif Paulo Freire terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia.
- Kuswono, K., Sumiyatun, S., & Setiawati, E. (2021). Pemanfaatan Kajian Sejarah Lokal Dalam Pembelajaran Sejarah di Indonesia. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian Lppm Um Metro*, 6(2), 206–209.
- Latief, J. A. (2024). *Manusia, filsafat, dan sejarah*. Bumi Aksara.
- Maulidan, A. C., & Darmawan, W. (2024). Implikasi Multikulturalisme dalam Pembelajaran Sejarah Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Persatuan Indonesia. *Jurnal Artefak*, 11(1), 49–64.
- McAlister, M. (2002). Edward Said, Orientalism (1978). *A Companion to Post-1945 America*, 550.
- Ni, L. B., & Hassan, N. A. (2023). Memupuk kemahiran pemikiran Sejarah dalam pengajaran Sejarah. *Jurnal Pemikir Pendidikan*, 11(1), 81–87.
- Obeng-Odoom, F. (2016). “The wretched of the earth.” *Journal of Australian Political Economy*, *The*.
- Rosyid, I. (2009). Historiografi Indonesiasentris: Usaha Membangun Kesadaran Historiografi Indonesia. *Globalisasi dan neoliberalisme: pengaruh dan dampaknya bagi demokratisasi Indonesia*, 279.
- Rozi, S., Noor, F., Gayatri, I. H., & Pabottingi, M. (2021). *Politik Identitas: Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua*. Bumi Aksara.
- Sari, A. K., & Sirozi, M. (2023). Politik Pendidikan Islam Indonesia Masa Reformasi (1998-Sekarang). *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 20–37.
- Segovia-Tzompa, S. M., Casimero, I., & Apagüño, M. G. (2024). When the past meets the future: Latin American Indigenous futures, transitional justice and global energy governance. *Futures*, 163, 103438. <https://doi.org/10.1016/J.FUTURES.2024.103438>
- Shesgreen, S. (2009). Canonizing the Canonizer: A Short History of The Norton Anthology of English Literature. *Critical Inquiry*, 35(2), 293–318. <https://doi.org/10.1086/596644>
- Suryawati, I., Seran, A., & Sigit, R. R. (2021). Third world subaltern women in the review of feminism theory postcolonial Gayatri Chakravorty Spivak.
- Syahputra, M. A. D., Sariyatun, S., & Ardianto, D. T. (2020). Peranan penting sejarah lokal sebagai objek pembelajaran untuk membangun kesadaran sejarah Siswa. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 4(1), 85–94.
- Tarc, A. M. (2023). Decolonial and education. *International Encyclopedia of Education: Fourth Edition*, 31–37. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818630-5.08011-8>
- Udasmoro, W. (2020). *Gerak Kuasa*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Utama, W. S. (2017). Nasionalisme dan Gagasan Kebangsaan Indonesia Awal: Pemikiran Soewardi Suryaningrat, Tjiptomangoenkusumo dan Douwes Dekker 1912-1914. *Lembaran Sejarah*, 11(1), 51–70.
- Wardhana, I. J. K. (2023). *Historiografi Pendidikan Indonesia: Genealogi Pendidikan Karakter dalam Lipatan Kesejarahan-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Wardhani, B. L. S. W. (2016). Respon Poskolonial terhadap Intensifikasi Pendidikan Kolonial di Afrika. *Global dan Strategis*, 10(1), 137.
- Wibowo, B. A., Pranowo, T. A., & Febrianto, A. (2023). *Sejarah Pendidikan*. UPY Press.